

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mindanao merupakan wilayah yang terkaya di Filipina dalam hasil tambang maupun sumber daya alam lainnya. Kondisi tersebut menarik perhatian pemerintah Filipina yang melihat Mindanao sebagai kawasan yang menawarkan solusi bagi permasalahan pemerintah Filipina menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah berupaya untuk mengeksploitasi hasil tambang maupun sumber daya alam wilayah Mindanao untuk keuntungan berbagai proyek industri di wilayah utara Filipina.

Pada waktu Filipina mendapatkan kemerdekaan tahun 1946, pemerintah Filipina mengadaptasi kebijakan kolonial Amerika dan terus melanjutkan peraturan kolonial Amerika tersebut di Mindanao. Dasar kebijakan pemerintah Filipina di Mindanao berkenaan dengan upaya untuk mengintegrasikan bangsa Moro ke dalam kehidupan nasional Filipina. Pemerintah Filipina dalam hal ini mengembangkan politik integrasi untuk kepentingan pembangunan negaranya secara utuh tanpa memperhatikan hak-hak bangsa Moro. Pengembangan politik integrasi ini cenderung diartikan sebagai politik *unformisasi* yaitu bentuk-bentuk kebijakan yang mengharuskan bangsa Moro untuk menghilangkan identitasnya dan memaksa mereka meleburkan diri ke dalam identitas nasional negara Filipina.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Moro pada masa itu, yang menjadi objek eksploitasi pemerintah Filipina adalah bangsa Moro di Mindanao.



Mereka mengalami perbenturan dengan pemerintah Filipina yang berawal dari persoalan diambilnya hak tanah mereka oleh pendatang Kristen-Filipino atas intervensi pemerintah dengan legitimasi undang-undang. Pada tahun 1950, penambahan penduduk di Kepulauan Luzon dan Visayas membuat pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan *Land Settlement Development Corporation* yaitu keberlanjutan program migrasi orang-orang dari wilayah utara dan tengah ke wilayah Selatan yang dilakukan secara intensif. Pemerintah sendiri memfasilitasi kebijakan tersebut dengan memberikan pinjaman lunak kepada penduduk yang bermigrasi ke Mindanao. Akibatnya, gelombang migrasi tersebut tidak hanya mengakibatkan secara demografi jumlah pendatang Filipino melebihi bangsa Moro tetapi juga menyebabkan banyak tanah bangsa Moro yang jatuh ke tangan orang Kristen-Filipino.

Pendudukan tanah di Mindanao yang secara terus menerus oleh para pendatang Kristen-Filipino menimbulkan kemarahan di antara bangsa Moro dan berdampak pada munculnya insiden-insiden berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Pemberlakuan *Land Registration Act* yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina tahun 1960 menetapkan semua tanah di Mindanao yang tidak terdaftar sebagai tanah umum dan tanah negara. Bangsa Moro merasa sangat tertekan ketika tanah yang mereka miliki harus diserahkan kepada para pendatang Kristen-Filipino atas legitimasi pemerintah Filipina melalui undang-undang. Hal ini berdampak pada hilangnya hak kepemilikan tanah masyarakat Moro di Mindanao.

Pemerintah Filipina dengan alasan nasionalisasi negara juga menggunakan kewenangannya dalam mengeksploitasi sumber daya di daerah Mindanao.

Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kesejahteraan hidup di kalangan bangsa Moro. Mereka hidup dalam kondisi sosial-ekonomi yang rendah, menanggung kekecewaan akibat sikap pemerintah yang diskriminatif, tidak adil dan mengesampingkan hak-hak mereka. Bangsa Moro tumbuh menjadi suatu kelompok marginal di wilayah Mindanao, hidup secara terpisah dan tersingkir di wilayah-wilayah yang bukan merupakan sentral ekonomi di negara Filipina. Ketidakadilan tersebut menjadi faktor pemicu bangsa Moro untuk melawan semua kebijakan pemerintah Filipina yang mengesampingkan hak-hak mereka. Gerakan-gerakan perlawanan muncul untuk memulihkan hak-hak bangsa Moro atas tanah air mereka yang pengelolaannya secara ketat dikontrol oleh pemerintah Filipina.

Kemerdekaan merupakan alternatif bagi bangsa Moro yang ingin menghentikan semua harapan penggabungan orang-orang dan wilayah Moro ke dalam Republik Filipina dan menghentikan dominasi pemerintah Filipina di Mindanao. Pandangan-pandangan mengenai masalah yang terjadi di Mindanao muncul di kalangan kader muda Moro yang progresif. Mereka dengan tegas mengangkat masalah ketidakpuasan umum masyarakat Moro dan insiden-insiden yang terjadi serta kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa Moro. Partisipasi dari kader muda Moro tersebut memunculkan kesadaran dasar di antara orang-orang Moro atas nasib mereka.

Pada tahun 1969 *Moro National Liberation Front* (MNLF) terbentuk atas prakarsa dari kader-kader muda Moro progresif yang bertujuan menuntut kemerdekaan penuh bagi Mindanao. Pembentukan MNLF tidak hanya didorong

oleh kemunculan identitas bersama di antara bangsa Moro yang merasa tertekan di bawah dominasi pemerintah Filipina, tetapi juga didorong oleh kebutuhan terhadap kekuatan yang bisa menyatukan dan memimpin perjuangan kemerdekaan Mindanao. MNLF mulai menegaskan kepemimpinan atas masalah-masalah bangsa Moro yang menyatakan tujuan bagi kemerdekaan Mindanao dari Republik Filipina melalui perjuangan bersenjata dan politik.

Tuntutan kemerdekaan MNLF membahayakan kepentingan pemerintah Filipina dalam rangka menjaga satu kesatuan *nation building*. Tuntutan kemerdekaan tersebut berbenturan dengan simbol perekat nasional yang mengatasnamakan nasionalisme dan integrasi yang menuntut adanya pola keseragaman nasional. Tuntutan mereka menjadi suatu ancaman serius bagi integritas politik dan wilayah negara Filipina.

Penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai masalah *Perjuangan Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam Menuntut Kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996) yaitu untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari perjuangan tersebut, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan semula ataukah terdapat alternatif-alternatif lain yang dicapai. Selain itu juga, ketertarikan penulis didasarkan pada alasan-alasan, yaitu *Pertama*, penulis tertarik melihat upaya – upaya perjuangan bangsa Moro yang diwakili oleh MNLF dalam menuntut hak-hak mereka. *Kedua*, penulis tertarik melihat hubungan yang terjadi antara MNLF yang menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina di satu sisi berhadapan dengan pemerintah Filipina yang berusaha untuk menjaga kerangka kedaulatan negara Filipina. *Ketiga*, MNLF menganggap bahwa

perjuangan mereka ditujukan untuk penentuan nasib sendiri, sedangkan pemerintah Filipina menggolongkan gerakan ini sebagai sebuah pemberontakan.

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah “Bagaimana perjuangan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996)”. Permasalahan utama tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang terbentuknya *Moro National Liberation Front* (MNLF)?.
2. Bagaimana upaya-upaya militer dan politik yang dilakukan oleh MNLF dalam mengimplementasikan perjuangan menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996)?.
3. Bagaimana hasil perjuangan MNLF dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996) ?.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah secara formal untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sidang sarjana kependidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Tujuan secara non formal adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana perjuangan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996)”. Hasil dan tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis dalam melakukan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran mengenai latar belakang munculnya *Moro National Liberation Front* (MNLF) sebagai sebuah organisasi pembebasan Moro yang cukup berpengaruh dan menjadi salah satu faktor Pemerintah Filipina harus mengerahkan seluruh perhatian dan kekuatan ke bagian Selatan.
2. Mengungkapkan tentang upaya-upaya politik dan militer yang dilakukan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam mengimplementasikan perjuangan menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996).
3. Memaparkan tentang hasil perjuangan MNLF dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996).

1.4. Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Gottschalk (1986: 32), metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode historis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang deskriptif dan analitis. Metode historis yang deskriptif dan analitis yaitu pemaparan fakta-fakta yang diperoleh kemudian dilakukan sebuah analisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan yang diperoleh dari sumber literatur.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan dengan cara meneliti literatur-literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Teknik studi kepustakaan digunakan oleh penulis didasarkan pada alasan untuk mendapatkan

sumber langsung dari tokoh sejarah bangsa Moro sangat sulit dilakukan, mengingat tokoh tersebut berasal dari luar Indonesia. Sehingga untuk memperoleh fakta dan informasi, penulis melakukan pengkajian terhadap sumber buku, artikel dan penelusuran-penelusuran sumber yang relevan melalui internet.

Langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah yang menurut Sjamsuddin (2007: 85-155) mengandung empat langkah penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Heuristik sebagai tahap awal dalam penelitian sejarah yaitu dengan melakukan pencarian sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Sumber-sumber ini dapat diperoleh dari kajian terhadap literatur-literatur yang ada seperti buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber lainnya.

Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan serta mencari dan membeli buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun artikel-artikel penulis mendapatkannya dari internet.

- b. Kritik, yaitu suatu metode untuk menilai sumber. Tahapan ini dimaksudkan untuk menilai keotentikan atau kelayakan sumber yang dipergunakan. Kritik sumber ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Analisis sumber dilakukan dengan cara melakukan kritik internal dan eksternal terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Kritik eksternal

digunakan untuk meneliti otentisitas dan integritas sumber sejarah yang diperoleh, sedangkan kritik internal digunakan untuk menilai reliabilitas dan kredibilitas isi (*content*) dari sebuah sumber sejarah. Upaya ini dilakukan dengan cara membandingkan semua sumber yang diperoleh.

- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data, dengan konsep-konsep dan teori. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan dan dihubungkan satu sama lain sehingga diperoleh sebuah analisis yang didukung oleh konsep-konsep tertentu yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
- d. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Tahapan ini adalah tahapan penulisan sejarah. Sumber-sumber sejarah yang telah melalui tahapan kritik eksternal dan internal, kemudian ditafsirkan dan selanjutnya disajikan hasilnya dalam bentuk sebuah tulisan sejarah secara jelas dengan gaya bahasa yang sederhana serta tata cara penulisan EYD yang baik dan benar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab. Bab pertama mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang dikaji dalam skripsi ini. Selain itu, bab ini berisi rumusan dan batasan masalah yang akan dikaji agar pembahasannya tidak meluas. Tujuan penulisan yaitu untuk mendeskripsikan semua maksud dari

permasalahan yang telah ditentukan. Selanjutnya dengan permasalahan yang telah dibatasi, penulis akan menjawab pertanyaan berdasarkan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode dan teknik penulisan yang berupa: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa sumber literatur yang menjadi rujukan penulis dalam mengkaji topik permasalahan. Sumber literatur tersebut mencakup telaah terhadap permasalahan mengenai “Perjuangan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996)”.

Bab ketiga akan dibahas tentang metodologi penelitian. Penulis dalam bab ini akan menguraikan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian dan teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Cara pengolahan sumber yaitu dengan melakukan kritik eksternal dan internal, kemudian tahapan interpretasi yaitu menganalisis terhadap fakta-fakta, dan tahapan akhir ialah historiografi yakni peneliti menuliskan laporan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di UPI.

Bab keempat merupakan uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Uraian tersebut berdasarkan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pertama. Permasalahan tersebut antara lain mengenai latar belakang terbentuknya *Moro National Liberation Front* (MNLF), upaya-upaya politik dan militer yang dilakukan oleh MNLF dalam mengimplementasikan perjuangan menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996), serta

hasil perjuangan MNLF dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996).

Bab kelima berisi beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan penulis mengenai "Perjuangan *Moro National Liberation Front* (MNLF) dalam menuntut kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969-1996)".

